MASIH TERUS BERPROSES

Target Bersihkan 5.000 Ton Sampah Belum Tercapai

YOGYA (KR) - Target pembersihan 5.000 ton lebih timbunan sampah di sejumlah depo dan fasilitas publik di Kota Yogyakarta belum tercapai sepenuhnya hingga Jumat (28/6), dan pembersihan masih terus berproses.

Pemda DIY bersama Pemkot Yogyakarta baru berhasil menggeser timbunan sampah di dua depo di Kota Yogyakarta ke TPA Piyungan. Dua depo itu ada di sebelah Barat Stadion Mandala Krida dan depo Pringgokusuman.

"Upaya penyelesaian persoalan sampah di Kota Yogya sudah masuk hari keempat. Pada hari pertama ada 611 ton sampah yang diangkut ke TPA Piyungan, kemudian hari kedua 541 ton, dan Kamis (27/6) turun sebanyak 440 ton lebih. Jumlah itu baru dari beberapa depo saja supaya optimal, maka kami selesaikan secara darurat selagi Kota Yogyakarta siapkan alat dan operasional pengolahan di Piyungan dan tempat lain," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono di Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (28/6).

Menurut Beny, langkah darurat tidak bisa terus-menerus dilakukan hanya dengan cara memindahkan sampah yang ada di Kota Yogya ke TPA Piyungan. Mengingat pemanfaatan celah kosong di TPA Regional Piyungan sifatnya hanya sementara dan ditargetkan hanya sampai Juli mendatang.

Kepala Balai Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY Aris Prasena mengatakan, penggeseran timbunan sampah ke TPA Piyungan ini dilakukan selama tiga hari dari 25-27 Juni 2024. Dalam kurun waktu tersebut, dua depo di Mandala Krida dan Pringgokusuman memang menjadi prioritas pengosongan menggunakan alat berat. Sementara untuk depo-depo sampah yang lain, juga dilakukan pengurangan timbunan sampah, meskipun belum sepenuhnya kosong.

"Jumlah 1.607 ton ini telah sesuai target untuk Tahap 1. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi di hari Jumat dan Senin pada Tahap 1 ini," ujar Aris.

Aris menyatakan, setelah dievaluasi akan ditindaklanjuti dengan melakukan pergeseran Tahap 2. Mengenai depo mana saja yang akan diprioritaskan, dilihat dulu hasil evaluasinya. Penggeseran ini dilakukan karena kondisi darurat, jadi apabila tidak segera ditangani akan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat dan lingkungan.

"Untuk mengatasi tumpukan 5.000 ton sampah, setidaknya akan ditangani dalam dua tahapan pergeseran ke TPA Piyungan. Karena tidak mungkin semuanya digeser ke Piyungan. Pemkot Yogyakarta juga terus melakukan pengolahan," terangnya. **(Ria)-d**

KR-Antara/Makna Zaezar

***PAMERAN UMKM:** Pengunjung mengamati produk kerajinan dari Jakarta saat Pameran dan Gelar Dagang Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) UMKM di Lapangan Pancasila, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (28/6/2024). Kegiatan dalam rangkaian puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31 yang diikuti ratusan produk UPPKA UMKM hasil binaan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan kementerian/lembaga se-Indonesia tersebut bertujuan menggerakkan masyarakat untuk cinta produk dalam negeri serta menumbuhkan perekonomian nasional.*

Menkominfo

Sambungan hal 1

Menkominfo dianggap tidak mampu menangani dan menyelamatkan data-data nasional akibat peretasan.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut memberikan komentar. Ma'ruf mengatakan, apakah Menkominfo akan diminta mundur dan digantikan oleh yang lebih berkompeten, biar menjadi hak prerogatif presiden.

"Saya kira urusan ganti mengganti itu hak prerogatif presiden, tetapi, persoalan ini harus kita dalami, pertama kita pulihkan dulu, baru kita cari sebabnya, siapa yang harus disalahkan itu nanti. Mengenai ganti menteri dan sebagainya itu hak prerogatif presiden," ujar Wapres kepada media di Malang.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dan sejumlah pihak ke Istana Jakarta, Jumat siang kemarin. Pemanggilan itu, untuk membahas kejadian peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang berlangsung sejak Kamis (20/6).

Selain Menkominfo, Presiden Jokowi juga memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas.

Selain itu, hadir juga dalam rapat internal itu Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian dan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. Turut hadir dalam kegiatan itu utusan dari penyedia infrastruktur data nasional, Telkom-Sigma, yang diwakili Direktur Network & IT Solution PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Herlan Wijanarko.

PDNS mengalami gangguan yang disebabkan serangan siber berjenis ransomware hingga berdampak pada beberapa layanan publik, termasuk layanan imigrasi. BSSN mengidentifikasi serangan tersebut dilakukan dengan ransomware yang diberi nama Brain Cipher Ransomware sebagai pengembangan terbaru dari ransomware lockbit 3.0.

Serangan tersebut dimulai dengan upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender pada 17 Juni 2024, yang memungkinkan aktivitas malicious pada 20 Juni 2024.

Aktivitas tersebut, termasuk instalasi file malicious, penghapusan file system penting dan penonaktifan layanan yang sedang berjalan. "Saat ini sedang proses pemulihan data. Kita kan mengikuti audit forensik yang dilakukan BSSN. Nanti Telkom rekomendasinya apa? Nanti kita laksanakan, kita pakai eksekutor," kata Herlan Wijanarko usai pertemuan tersebut.

Menkumham Yasonna Laoly memastikan kondisi data layanan imigrasi yang kini dialihkan ke Amazon Web Service (AWS) pascaserangan siber, dalam kondisi aman. "Sekarang masih di situ, masih di AWS. Lengkap, bagus, tidak ada lagi kendala," kata Yasonna Laoly

Dalam kesempatan itu, Yasonna memastikan data imigrasi yang tersimpan di AWS dalam kondisi aman dari kebocoran. Namun, Yasonna belum dapat memastikan sampai kapan data imigrasi yang kini tersimpan di AWS akan dikembalikan ke Pusat Data Nasional (PDN) di Indonesia.

Layanan imigrasi Kemenkum HAM dipindahkan ke AWS menyusul gangguan di PDN akibat serangan ransomware. Hingga Senin (24/6), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN serta Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasi sebanyak 211 instansi yang terdampak insiden serangan siber PDNS 2. Sehari berselang, teridentifikasi ada sebanyak 282 instansi yang terimbas insiden itu.

Pada Rabu (26/6), tercatat 44 instansi melakukan pemulihan data, sementara sisanya masih dalam proses. **(Ant/Obi)-f**

Tarif

Sambungan hal 1

Namun, tutur Jisman, untuk menjaga daya saing dan mengendalikan inflasi, pemerintah memutuskan tarif listrik tetap atau tidak naik. Sesuai regulasi tersebut, parameter ekonomi makro yang digunakan untuk triwulan III 2024 adalah realisasi pada Februari, Maret, dan April 2024, yaitu kurs sebesar Rp 15.822,65 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar 83,83 dolar AS per barel, inflasi sebesar 0,38 persen, dan HBA sebesar 70 dolar AS per ton sesuai kebijakan DMO Batubara.

Jisman menambahkan bahwa tarif tenaga listrik untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami kenaikan dan tetap mendapatkan subsidi listrik. "Termasuk di dalamnya pelanggan sosial, rumah tangga tidak mampu, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM," ucapnya. **(Ant/Has)-f**

Mantan

Sambungan hal 1

Tujuannya, supaya dapat berkontestasi sebagai capim KPK.

"Anggota-anggota IM57 yang menggugat ambang batas umur minimal 50 tahun di MK dan akan mendaftar seleksi capim KPK," kata Praswad. **(Obi)-d**

Muhammadiyah

Sambungan hal 1

Dalam mengatasi masalah PDN, pemerintah harus berkomunikasi dengan jujur dan terbuka kepada masyarakat serta berharap pemerintah dengan segera menyusun kembali sistem siber yang lebih komprehensif dengan melibatkan expert dari berbagai pihak yang transparan. **(Fsy)-f**

Mendag

Sambungan hal 1

Dengan naiknya harga MinyaKita dari Rp 14.000 menjadi Rp 15.700 perliter, dinilai tetap akan lebih murah dari minyak goreng kemasan premium. Namun, Zulhas tidak merinci lebih jelas harga minyak goreng premium tersebut. "Ya tentu MinyaKita masih menjadi yang termurah," katanya.

Saat ini, HET MinyaKita masih ditetapkan sebesar Rp 14.000 perliter. Aturan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.

Dari pantauan di pasaran, minyak goreng kemasan MinyaKita banyak dicari masyarakat baik di perkotaan maupun perdesaan, termasuk di pasar-pasar tradisional dan toko-toko kebutuhan pokok. Hal ini disebabkan harga MinyaKita yang lebih murah dibandingkan minyak kemasan lainnya. **(Ant/San)-f**

Bencana

Sambungan hal 1

barulah (7) jalankan sistemnya, dan terakhir (8) evaluasi secara berkala. Yang sering terjadi adalah langsung ke langkah (4) dan tidak diikuti langkah lainnya.

Lihat saja contohnya, Kemdikbud, khususnya Ditjen Dikti, banyak memiliki aplikasi, ada Bima, Sinta, Sister, PAK (penilaian angka kredit), PDDikti, Pemutu, Seruni, dan masih banyak lagi. Apakah datanya sinkron Banyak yang tidak sinkron! Apalagi data tentang perguruan tinggi yang mestinya ada di PDDikti (pddikti.kemdikbud. go.id), tapi tidak mampu menampilkan berapa jumlah kampus di Indonesia! Lihatlah contoh yang sangat bagus, yaitu laman lldikti5.id/evira milik LLDikti wilayah V DIY.

Kembali ke masalah PDN, harusnya Pemerintah Pusat memiliki dulu rencana strategis TI-nya seperti apa. Misalnya menghubungkan layanan kependudukan dengan layanan perpajakan, kesehatan, pendidikan, kepegawaian, bantuan sosial, pernikahan, perizinan, dan sebagainya. Setelah itu identifikasi seperti apa datanya, siapa pemilik dan penyelenggara datanya, pengelola datanya, dan seterusnya. Lalu direncanakan aplikasinya seperti apa. Barulah dibuat aplikasinya dan pengamanannya, baik pengamanan aktif maupun pasif.

Setelah itu, perlu diuji coba. Panggil para calon usernya, bisa lancar memakainya atau tidak. Lalu para adminnya, bisa menghadapi kondisi darurat atau tidak. Kalau perbankan biasanya memanggil para white hacker untuk menjebol aplikasi mereka. Kasih waktu dua minggu. Kalau berhasil menjebol sistem, akan dibayar sekian milyar. Kalau gagal, cukuplah dikasih biaya beli laptop gaming. Itulah sebabnya aplikasi perbankan sulit dijebol, karena tingkat keamanannya sangat tinggi.

Sebenarnya Pemerintah sudah menerbitkan Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perpres ini mengamanatkan Kementerian, Lembaga Negara, dan seluruh Pemda (K/L/D) untuk segera bertransformasi ke sistem digital, sejak tahun 2018. Namun sudah 5 tahun lebih berlalu, sepertinya tujuan itu masih sulit tercapai. Oleh karena itulah Presiden, menerbitkan Perpres 82/2023, untuk membangun SuperApp SPBE yang harus sudah operasional selambat-lambatnya kuartal ke-3 tahun 2024 ini. Yang dikhawatirkan banyak pengamat adalah: yang ditunjuk untuk membangun aplikasi yang sangat digdaya itu adalah Perum Peruri! Ya, justru sebuah perusahaan yang di luar jalur Pemerintah yang pada akhir tahun 2023 ditunjuk untuk merealisasikan impian Presiden akan adanya SuperApp Prioritas.

Mengapa banyak pihak (terutama saya) menyangsikan kemampuan Perum Peruri Karena Peruri bukanlah bagian dari Pemerintah, jadi tidak merasakan bagaimana melayani data yang berkaitan dengan penduduk dan layanan Pemerintah lainnya. Selain itu, hingga saat ini, belum ada sosialisasi atau paparan seperti apa sistemnya (dan tentu ekosistemnya) yang akan dibangun. Jangan-jangan nanti seperti Sirekap yang tiba-tiba muncul pada masa Pilpres dan akhirnya banyak menimbulkan keonaran publik karena banyak kejanggalan.

Kalau pengembangan aplikasi sudah memenuhi kaidah-kaidah yang biasa diajarkan di kampus-kampus TI dan diterapkan oleh perusahaan pengembang TI yang profesional, niscaya bencana seperti yang dihadapi PDN dan beberapa aplikasi Pemerintah lainnya yang sudah pernah terjadi, tentu dapat dihindari.

(Penulis, Dosen STIE YKPN Yogyakarta, asesor SPBE KemenPANRB 2018-2022 dan Tenaga Ahli Smart City Kemkominfo sejak 2018)-d

SYL

Sambungan hal 1

maka harta benda SYL dapat disita dan dilelang jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. "Jika tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama empat tahun," kata jaksa.

Diungkapkan, SYL terbukti secara sah bersalah melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam menjatuhkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, yakni SYL dinilai tidak berterus terang atau berbelit belit dalam memberi keterangan, perbuatannya selaku menteri telah mencederai kepercayaan masyarakat Indonesia. "Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam program pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa dengan motif yang tamak," sambung jaksa.

Sementara itu, hal-hal yang meringankan tuntutan ialah SYL telah berusia lanjut, yakni 69 tahun pada saat ini. Pada perkara ini, SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp 44,5 miliar di lingkungan Kementan pada rentang waktu 2020-2023. Pemerasan dilakukan bersama Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021-2023 Kasdi Subagyono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI tahun 2023 Muhammad Hatta. Keduanya juga duduk sebagai terdakwa dalam perkara ini. **(Ful)-d**

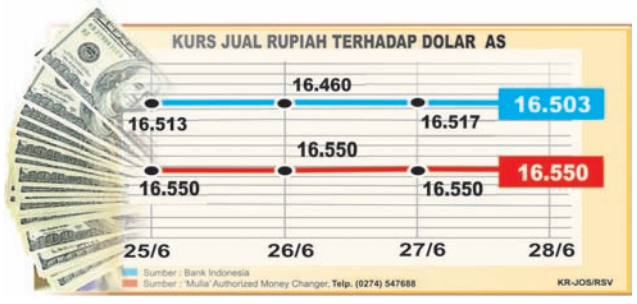

Prakiraan Cuaca Sabtu, 29 Juni 2024

Lokasi	Cuaca: Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Sleman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95

Cerah, Berawan, Udara Kabur, Hujan Lokal, Hujan Petir

Grafis : Arko

Fenomenologi Konstruksi Sosial Komunikasi Pengemis

Dr Junaidi, SAg MHum MKom
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta

FILSAFAT fenomenologi berasal dari bahasa Yunani phainomai yang berarti 'menampak'. Kata phainomenon merujuk kepada hal 'yang menampak'. Artinya, fenomena dapat kita artikan sebagai fakta yang disadari yang kemudian masuk ke dalam pemahaman dan pemikiran manusia. Jadi suatu obyek itu ada dalam relasi dengan sebuah kesadaran. Maka fenomenologi merefleksikan pengalaman langsung manusia sejauh pengalaman itu secara intensif berhubungan dengan suatu obyek tertentu.

Dalam teori fenomenologi Alfred Schutz, fenomenologi adalah studi tentang dunia pengalaman sensorik bermakna yang pertama kali muncul secara individual dalam kesadaran individu manusia dan kemudian secara kolektif hadir dalam interaksi antar kesadaran manusia. Schutz mengatakan bahwa fenommenologi tertarik untuk mengidentifikasi masalah yang mengitari manusia. Ini adalah bagian di mana kesadaran bertindak pada data sensorik untuk menciptakan dengan cara yang sama, dan dari jarak ini sesuatu yang samar menjadi terlihat dengan jelas.

Hakikat kemanusiaan pada dasarnya bukanlah sekedar human being tetapi human becoming. Manusia menjadi lebih bermakna jika dirinya dipandang sebagai 'menjadi manusia' (human becoming) bukan hanya atas dasar 'kemanusiaannya' (human being). Sebuah filsafat proses yang 'menjadi' itulah bagian dari hakikat diri manusia sesungguhnya. Proses itu adalah sebuah pilihan. Ketika seseorang sudah menentukan pilihan jalan hidupnya atau ketika seseorang sudah menjadi bagian dari kelompok tertentu walaupun diakuinya bahwa hal itu bukan pilihan hidupnya. Secara interpersonal kita dapat menunjukkan rasa empati kepada mereka.

Fenomena pengemis dan gelandangan menjadi problematika yang saat ini marak ditemukan. Hal ini terlihat dari banyaknya pengemis dan gelandangan yang menggunakan varian modus demi mendapatkan belas kasihan dan uluran tangan dari masyarakat sekitar. Saat ini sering kita jumpai berbagai macam bentuk pengemis, salah satunya dengan membawa anak, yang berkeliaran di tengah kota, seperti pada fasilitas umum, lampu merah dan sudut-sudut pusat perbelanjaan. Tidak hanya satu namun kita dapat menjumpai mereka duduk ditempat atau yang biasa disebut base camp tempat mereka berkumpul dengan sekelompok pengemis lainnya.

Masalah Ekonomi dan Kemiskinan

Indonesia memiliki suatu permasalahan klasik yaitu ekonomi dan kemiskinan. Permasalahan ini selalu terdengar hingga dan menjadi suatu masalah yang saat ini belum teratasi dengan maksimal meskipun sudah banyak upaya yang dibuat dan beberapa kebijakan yang memiliki tujuan untuk memberikan sebuah upaya dalam peningkatan perekonomian, pemenuhan hak atas pendidikan, pelayanan fasilitas kesehatan, serta tujuan pendapatan dengan harapan mampu dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Kemiskinan merupakan suatu problematika yang selalu ditemukan dalam kehidupan masyarakat karena batas kesanggupan manusia serta ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya yang begitu dalam kehidupan sehari-hari, misal dalam pemenuhan hak pendidikan, mendapatkan fasilitas kesehatan, serta pemenuhan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan Masyarakat. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa anak-anak, orang miskin dan orang terlantar dipelihara oleh negara. Oleh karena itu, pengemis harus mendapat perhatian khusus dari negara sesuai dengan Pasal 34(1) tersebut. Pengemis harus diurus oleh negara dan negara harus menjamin terpeliharanya ketertiban kehidupan bermasyarakat.

Suatu pengalaman dapat diartikan sebagai sesuatu yang dialami, dijalani, dirasakan, baik itu terjadi pada masa lampau maupun terjadi secara kebetulan. Pengalaman adalah peristiwa yang ditangkap oleh indera dan disimpan dalam memori. Pengalaman mungkin didapat atau dirasakan ketika suatu peristiwa baru saja terjadi atau sudah berlangsung lama. Pengalaman komunikasi dapat dibedakan menjadi pengalaman menyenangkan dan tidak menyenangkan.

Selain pengalaman menyenangkan dan tidak menyenangkan, Alfred Schutz mengelompokkan ada motif suatu perilaku manusia. Motif dibagi menjadi dua tahap sebagai gambaran atas keseluruhan tindakan suatu individu yaitu Because Motives (Well motiv), motif yang melatarbelakangi suatu alasan masa lalu yang menyebabkan suatu aksi atau tindakan oleh aktor sosial. Serta In Order to Motives, didasari oleh tindakan di masa mendatang, dan tindakan tersebut memiliki tujuan yang telah ditetapkan oleh manusia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 27, 54 juta orang penduduk Indonesia pada tahun 2021 hidup dalam garis kemiskinan yang artinya tingkat kemiskinan Indonesia menyentuh angka sampai 10,48%. Artinya, angka ini tentu tidaklah stagnan, tentu akan terjadi tumbuh-kembang kemiskinan ditengah-tengah masyarakat. Kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu mendera masyarakat. Masyarakat miskin harus berjuang setiap hari untuk bertahan hidup dan mendapatkan pekerjaan. Beberapa orang memilih jalan pintas dengan mengemis agar mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih mudah. Semoga!.

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park